

Efektifitas Pola Pembiayaan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Umkm Klaster Agribisnis Di Propinsi Banten

Meutia

Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tirtayasa Banten

e-mail: tia_almer@yahoo.co.id

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Peran tersebut mendorong Pemerintah dan pihak-pihak yang *concern* terhadap UMKM untuk terus berupaya memberdayakan UMKM agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Salah satu lembaga yang sangat *concern* dalam pengembangan UMKM adalah Bank Indonesia. Banyak kendala dalam pengembangan UMKM terutama masalah permodalan. Bank Indonesia melalui program pembiayaan petani melalui kelompok UMKM klaster agribisnis. Tujuan Kajian ini adalah untuk mengetahui pola pembiayaan dan efektifitas kemitraan pembiayaan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM klaster agribisnis di Propinsi Banten. Penelitian ini dilakukan pada kelompok klaster UMKM bawang merah di Kabupaten Serang dan kelompok klaster UMKK cabe di Kabupaten Pandeglang. Metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer yaitu melalui FGD dengan fasilitator Bank Indonesia dan kelompok klaster UMKM bawang merah dan cabe merah sedangkan data sekunder diperoleh dari data Bank Indonesia, artikel hasil penelitian Bank Indonesia dan data dari dinas pertanian Propinsi Banten. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu mengidentifikasi dan menganalisis efektifitas kemitraan pembiayaan terhadap pengembangan UMKM klaster agribisnis di Propinsi Banten. Hasil kajian pola kemitraan Bank Indonesia melalui sistem pemberdayaan kelompok tani dan pembiayaan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM klaster agribisnis sangat efektif dalam pengembangan klaster UMKM agribisnis yang ditunjukkan dengan kenaikan pendapatan dan keahlian dalam berusahatani anggota kelompok klaster agribisnis bawang merah dan cabe merah di Propinsi Banten. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas serta penguatan klaster sehingga kelompok klaster bisa mandiri jika program Bank Indonesia sudah berakhir. Perlu penelitian lanjutan secara kuantitatif untuk membuktikan efektifitas pembiayaan dalam pengembangan klaster UMKM agribisnis.

Kata Kunci : Kemitraan, Pembiayaan BI , Klaster UMKM Agribisnis.

Pendahuluan

Sektor riil yang sebagian besar terdiri dari usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai peranan penting yang strategis dalam perekonomian Indonesia. Peranan UMKM telah mampu membuktikan pada saat terjadi krisis di Indonesia dimana UMKM tidak terpengaruh dengan adanya krisis bahkan lebih eksis dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. UMKM memiliki peranan dalam penyerapan tenaga kerja, pengolahan sumber daya lokal, pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi pedesaan. Sebagian besar UMKM bergerak

dalam sektor usaha pengolahan sumber daya lokal sehingga mempunyai nilai jual sehingga UMKM mapu menambah nilai ekonomi produk. Hal ini akan berdampak pada perekonomian disekitar lingkungan industry sehingga akan membawa *multiplier effect* bagi lingkungan sekitar. Berdasarkan peranannya yang sangat besar dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan maka pengembangan dan penguatan UMKM perlu menjadi perhatian dan kebijakan pemerintah sekarang ini.

Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan UMKM baik melalui dinas terkait maupun program-program lain yang dibuat seperti program kewirausahaan pada mahasiswa untuk mendorong munculnya entrepreneur-entrepreneur muda yang lebih kreatif. Peran lembaga swasta seperti perusahaan dan industry untuk mendukung program pengembangan kewirausahaan melalui *Cooperate Social Responsibility* banyak dilakukan. Namun sampai saat ini hasilnya belum maksimal karena kegiatan yang dilakukan lebih individual dan sektoral. Selain itu juga kegiatan tidak dilakukan secara terus menerus melainkan berkala jika ada program saja sehingga kesinambungan kegiatan tidak tercapai. Berdasarkan fenomena yang terjadi maka perlu pengembangan UMKM yang lebih terpadu dan terarah sehingga UMKM bisa berkembang mulai dari hulu hingga ke hilir. Pendekatan klaster UMKM merupakan salah satu alternatif yang sudah berhasil dilakukan di negara maju dan beberapa Negara berkembang. Pendekatan klaster dianggap sangat efektif karena dalam pengembangan klaster mensyaratkan keterlibatan seluruh stakeholders sehingga mampu mengembangkan unit-unit usaha lebih efisien dan mampu menstimulasi munculnya UMKM pendukung klaster.

Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintah yang sangat peduli dalam kegiatan pengembangan UMKM membuat *pilot project* dalam program pengembangan klaster yang dilakukan di seluruh Propinsi di Indonesia. Ada 6 propinsi yang menjadi sasaran pengembangan klaster UMKM di Indonesia, salah satunya adalah Propinsi Banten. Letak Propinsi Banten yang sangat strategis karena terletak pada lalu lintas nasional antar pulau Sumatra dan Pulau Jawa dan lalu lintas perdagangan internasional karena memiliki bandara internasional Sukarno Hatta. Ada beberapa klaster yang menjadi sasaran Bank Indonesia untuk dikembangkan. Hal itu dilihat dari sumber daya lokal yang dimiliki oleh Propinsi Banten. Kabupaten Pandeglang pengembangan klaster emping melinjo, gula aren dan cabai merah. Kabupaten Serang pengembangan klaster bawang merah yang berada di Kecamatan Kramatwatu. Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan klaster agribisnis di Propinsi Banten tidak hanya

sebatas pada pembiayaan tetapi pelatihan dan pendampingan yang langsung di lakukan oleh petani yang sudah berpengalaman. Contohnya studi banding untuk petani bawang merah dan cabai ke Brebes. Kemudian studi banding pengrajin emping melinjo ke Kabupaten Batang dan Bnatul di Jawa Tengah. Berdasarkan fenomena diatas maka kajian penelitian ini ingin menganalisis efektifitas kemitraan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM klaster agribisnis di Propinsi Banten.

Tinjauan pustaka

1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995, kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimiliki adalah (a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau; (b). Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah). Sedangkan untuk usaha menengah memiliki kriteria sebagai berikut : (a). Untuk sektor industri, memiliki aset paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) (b). Untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) per tahun.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), mendefinisikan UKM sebagai industri yang memiliki kurang dari 100 karyawan. BPS mengelompokkan industri kedalam 4 golongan yaitu: (1). Industri kerajinan dengan jumlah karyawan 1-4 karyawan. (2). Industri kecil dengan jumlah karyawan 5-19 karyawan. (3). Industri sedang dengan jumlah karyawan 20-99 orang. (4). Industri besar dengan jumlah karyawan lebih besar dari 100 orang

Menurut Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Dinkop PKM), unit usaha yang mempunyai omset kurang dari Rp. 50.000.000,- dan maksimal Rp. 2.000.000.000,-. Dari semua pengertian mengenai UKM, pada dasarnya definisi UKM hanya berhubungan dengan 3 hal (Dinkop PKM, 2005) yaitu : (a) Volume tenaga kerja, (b) Volume penjualan per tahun, (c) Nilai aset di luar tanah dan bangunan.

2. Pembiayaan Bank Indonesia

Peranan Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM menurut UU No. 13 Tahun 1968 Bank Indonesia memberikan kredit dengan subsidi bunga (KLBI) dan pemberian bantuan teknis. Terjadi perubahan UU No. 23 tahun 1999 bahwa Bank

Indonesia hanya memberikan bantuan teknis. Pemberdayaan UMKM di Bank Indonesia dilakukan dengan cara memberikan pelatihan, melakukan penelitian atau survai, memfasilitasi para pihak terkait dalam bentuk kordinasi, dan diseminasi informasi. Salah satu pilar kebijakan Bank Indonesia tersebut adalah mendorong pengembangan UMKM melalui pemberian bantuan teknis. Kegiatan penelitian dan penyediaan informasi merupakan salah satu kegiatan dalam kerangka bantuan teknis, sehingga diharapkan akan dapat memberikandata dan informasi yang bermanfaat baik kepada pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luar yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan UMKM.

3. Cluster UMKM Agribisnis

Menurut Porter (1998) klaster merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Mereka berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi. Klaster mendorong industri untuk bersaing satu sama lain. Selain industri, klaster termasuk juga pemerintah dan industri yang memberikan dukungan pelayanan seperti pelatihan, pendidikan, informasi, penelitian dan dukungan teknologi. Sedangkan menurut Schmitz (1997) klaster didefinisikan sebagai grup kegiatan yang berkumpul pada satu lokasi dan bekerja pada sektor yang sama. Sementara Enright, M,J, (1996) mendefinisikan klaster sebagai perusahaan-perusahaan yang sejenis/sama atau yang saling berkaitan, berkumpul dalam suatu batasan geografis tertentu (Laporan Akhir Kajian Efektifitas Model Penumbuhan Klaster Bisnis, UKM Berbasis Agribisnis, 2012).

Pembentukan klaster menjadi sesuatu yang penting karena secara individual UKM seringkali tidak sanggup menangkap peluang pasar yang membutuhkan jumlah volume produksi yang besar, standar yang homogen dan penyerahan yang teratur. UKM seringkali mengalami kesulitan mencapai skala ekonomis dalam pembelian input dan akses jasa-jasa keuangan dan konsultasi. Beberapa contoh keuntungan klaster adalah: (1). Melalui kerjasama horisontal, misalnya bersama UKM lain menempati posisi yang sama dalam mata rantai nilai (*value chain*) secara kolektif perusahaan-perusahaan dapat mencapai skala ekonomis melampaui jangkauan perusahaan kecil secara individual, dan dapat memperoleh input pembelian curah, mencapai skala optimal dalam penggunaan peralatan dan menggabungkan kapasitas produksi untuk memenuhi order skala besar. (2). Melalui integrasi vertikal (dengan UKM lainnya maupun dengan perusahaan besar dalam mata rantai pasokan), perusahaan-perusahaan dapat memfokuskan diri ke bisnis intinya dan memberi peluang pembagian tenaga kerja eksternal.

PEMBAHASAN

1. Potensi Propinsi Banten

Banten merupakan provinsi baru di Indonesia yang memiliki banyak potensi bisnis daerah, seperti pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, dan pertambangan. Dengan jumlah penduduk mencapai 10.632.166 sesuai data sensus penduduk tahun 2010, Banten merupakan salah satu provinsi baru di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan UU No. 23 tahun 2000. Berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara; Selat Sunda di sebelah barat; Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di bagian timur; serta Samudera Hindia di sebelah selatan, wilayah Banten menjadi jalur lalu lintas laut yang cukup strategis, yakni menghubungkan antara Australia dengan kawasan Asia, serta menjadi penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera.

Peluang investasi di Banten sangat besar dengan dukungan infrastruktur yang sangat baik, yaitu tersedianya Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, Jalan Bebas Hambatan Jakarta - Merak, Jaringan Jalan Kereta Api Jakarta - Rankasbitung - Merak dan yang terbaru dan sedang dibangun adalah Pelabuhan Bojonegara. Untuk pasokan tenaga listrik, Banten didukung oleh jaringan distribusi interkoneksi Jawa - Bali dengan salah satu pembangkit utamanya yaitu yang berada di Suralaya yang berada di Cilegon. Selain itu juga terdapat pembangkit yang juga dijual untuk publik yang dimiliki oleh PT. Krakatau Daya Listrik (KDL), anak perusahaan dari PT. Krakatau Steel (KS). Sedangkan untuk sektor industri telah tersedia 17 (tujuh belas) Kawasan Industri yang tersebar di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon (Profil Potensi Investasi Ekonomi Propinsi Banten, 2009)

Sejak tahun 2002 silam, tingkat produksi pertanian di Daerah Banten mengalami peningkatan yang cukup positif meskipun kecenderungannya masih terbilang lamban. Seperti pada tahun 2005, potensi pertanian Banten mulai berkembang menjadi 364.721 ha dan 1.812.495 ton dengan tingkat produksi per hektar sekitar 49,6 ton/ha. Selain itu, produksi tanaman palawija juga mengalami peningkatan sebesar 4,08% setiap tahunnya dengan tingkat rasio mencapai 1,64. Dua tanaman palawija yang cukup diandalkan masyarakat Banten sebagai potensi unggulan yaitu ubi kayu dan kacang kedelai (Potensi Bisnis Propinsi Banten, 2012)

2. Karakteristik Cluster Cabe Merah di Propinsi Banten

Berdasarkan data tahun 2010, Provinsi Banten mengalami kekurangan pasokan cabe sebesar 47.858 ton atau 86,56% dari kebutuhan konsumsinya. Kekurangan pasokan tersebut selama ini dipenuhi dari daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian dari luar Jawa. Dengan demikian, klaster cabe di Provinsi Banten memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Dengan letak sentra produksi cabe di Provinsi Banten yang cukup dekat dengan pasar, cabe asal Banten memiliki daya saing yang lebih tinggi karena: 1) Biaya distribusi cabe asal Banten jauh lebih murah dibandingkan cabe asal Jawa Tengah dan Jawa Timur; 2) Cabe asal Banten lebih segar ketika sampai ke konsumen. Dalam tahun 2009, produksi cabe besar di Provinsi Banten terutama dihasilkan oleh Kabupaten Serang sebanyak 26.649 kuintal atau 65.38% dan Kabupaten Pandeglang 5.947 kuintal atau 14.59% dari total produksi cabe besar Provinsi Banten. Dengan memperhatikan data tersebut maka pengembangan klaster cabe di Provinsi Banten dilaksanakan di daerah produsen utama yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang (Bank Indonesia, 2013).

Salah satu Kabupaten yang dekat dengan Provinsi Banten adalah Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang merupakan daerah yang berpotensi untuk budidaya cabai. Dengan pola sinergi dan kemitraan program pengembangan klaster cabai Kabupaten Pandeglang bisa tercipta menjadi komoditas unggulan. Program klaster cabai BI mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini dinas pertanian dan peternakan baik tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten, ternyata sangat membantu para petani setempat untuk lebih meningkatkan produksi cabai. Luas panen, produksi dan produktivitas cabai binaan Bank Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Cabai Binaan Bank Indonesia

Kecamatan	Jumlah Produksi (Ton)	Jumlah Luas Panen (Ha)	Produktivitas
Panimbang	465	23	20
Jiput	1180	52	23
Pandeglang	490	46	11

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2012

3. Karakteristik Cluster Gula Aren di Propinsi Banten

Gula aren sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu pemanis makanan dan minuman yang bisa menjadi substitusi gula pasir (gula tebu). Gula aren diperoleh dari proses penyadapan nira aren yang kemudian dikurangi kadar airnya

hingga menjadi padat. Produk gula aren ini adalah berupa gula cetak dan gula semut. Gula cetak diperoleh dengan memasak nira aren hingga menjadi kental seperti gulali kemudian mencetaknya dalam cetakan berbentuk setengah lingkaran. Untuk gula semut, proses memasaknya lebih panjang yaitu hingga gula aren mengkristal, kemudian dikeringkan (dijemur atau dioven) hingga kadar airnya di bawah 3%. Jenis yang terakhir ini memiliki keunggulan yaitu berdaya tahan yang lebih lama, lebih higienis dan praktis dalam penggunaannya.

Gula aren selama ini menjadi sumber mata pencaharian penting bagi para petani di sentra-sentra produksinya. Salah satu sentra produksi gula aren di Indonesia adalah di Kabupaten Lebak, Propinsi Banten yaitu tepatnya di desa Hariang, Kecamatan Sobang. Kabupaten Lebak dikenal sebagai salah satu daerah penghasil gula aren terbesar di Indonesia. Industri gula aren di kabupaten ini menyerap 5.406 tenaga kerja melalui 2.982 unit usaha mikro dan kecil, belum termasuk tenaga kerja di saluran distribusinya. Kapasitas produksi per tahun mencapai 2.249,4 ton yang tersebar di 44 sentra produksi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lebak, 2005)

Lokasi usaha produksi gula aren sebaiknya berada di dekat sumber bahan baku yaitu nira aren. Hal ini disebabkan daya tahan nira aren hanya tiga jam sebelum menjadi asam akibat proses fermentasi. Oleh karena itu, bahan baku perlu penanganan yang cepat dan nira hasil sadapan harus segera diolah menjadi gula cetak.

Daerah yang memiliki banyak pohon aren, umumnya menjadi lokasi sentra produksi gula aren baik gula aren cetak maupun gula aren semut. Salah satu sentra produksi yang relatif berkembang ada di Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Di wilayah tersebut terdapat 44 sentra produksi yang mampu menghasilkan ± 2.249 ton gula aren per tahun (Bank Indonesia, 2009).

Industri gula aren dilakukan secara padat karya sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Keterlibatan tenaga kerja dimulai dari penyadapan nira, pembuatan nira, pencetakan, pengemasan dan penjualan nira. Bahan baku diperoleh dari enam kecamatan yaitu, Sobang, Muncang, Malimping, Cijaku, Penggarangan, dan Cibeber di Kabupaten Lebak. Sampai saat ini pemasaran gula aren masih sebatas Kabupaten Pandeglang dan Propinsi Banten.

4. Karakteristik Cluster Emping Melinjo di Propinsi Banten

Emping melinjo merupakan salah satu produk UMKM khas Banten. Hampir seluruh wilayah Banten merupakan daerah yang cocok untuk tanaman melinjo seperti Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.

Buah melinjo bisa di olah menjadi sayuran dan produk olahan makanan lainnya. Salah satunya adalah olahan emping melinjo. Setiap tahun produksi tanaman melinjo adalah sekitar 200 ribu ton/tahun. Pemasaran emping melinjo sudah tersebar ke seluruh Kota di Indonesia bahkan ke luar negeri. Namun sampai saat ini Pengusaha emping melinjo asal Banten belum berani melakukan ekspor sendiri tetapi masih tergantung pada pengusaha emping melinjo dari Jakarta. Pengusaha emping melinjo menyediakan bahan baku emping melinjo selanjutnya proses grading, pengemasan dilakukan oleh pengusaha Jakarta kemudian emping melinjo di ekspor. Penawaran ekspor emping ke luar negeri sampai saat ini sering terhambat karena terbatasnya kapasitas dan kontinuitas produksi. Padahal pasar luar negeri merupakan pasar yang cukup potensial seperti Arab Saudi, Jepang, China, Malaysia, Singapura, Taiwan bahkan Belanda. Padahal ketersediaan bahan baku emping melinjo di Propinsi Banten sangat berlimpah.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri kerupuk tangkil (emping) di Banten menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Setidaknya, industri rakyat ini, kapasitas produksinya semakin meningkat, dan 500 ton per tahun beredar dan dikonsumsi masyarakat internasional karena sudah berhasil menembus pasar ekspor. Pasar yang sudah ditembus antaranya Singapura, Malaysia, Jepang, dan Amerika. Emping menjadi selingan minum teh oleh sejumlah warga di luar negeri. dari kebutuhan ekspor emping sekitar 1.700 ton per tahun, ke berbagai negara, ternyata pihak ekportir hanya sanggup menyediakan 500 ton saja. Artinya dari kekurangan itu, bisnis ini masih sangat memberi peluang (Harian Umum Pelita, 3 Agustus 2014)

Industri emping elinjo banyak membutuhkan tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja dibutuhkan mulai panen melinjo, pengupasan, proses pembuatan emping, penjemuran, penyortiran, pengemasan dan pemasaran emping melinjo. Bahan baku untuk pembuatan emping melinjo di peroleh dari Kabupaten Pandeglang seperti Jiput, Menes, Labuan, Pagelaran dan Saketi. Untuk Kabupaten Serang bahan baku emping melinjo di peroleh dari Kecamatan Mancak, Gunung Sari, Anyer, Waringin Kurung, Pabuaran dan Padarincang. Sehingga klaster untuk emping melinjo di pusatkan di Kabupaten Pandeglang karena sangat potensial jika dilihat dari jumlah bahan baku dan sebaran pengusaha dan pengrajin emping melinjo (Bank Indonesia, 2009).

5. Pola Pembiayaan Bank Indonesia Pada Cluster UMKM Agribisnis

Kebijakan BI Sejak berlakunya UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (sebagaimana di amandemen dengan UU No. 3/2004), maka kebijakan Bank Indonesia

dalam mendukung peningkatan iklim usaha atau sektor riil telah mengalami perubahan mendasar. Perubahan tersebut adalah bahwa Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan KLBI dan pemberian bersifat tidak langsung antara lain melalui regulasi dan fasilitasi dalam peran-peran strategis. Dengan kata lain, Bank Indonesia tidak secara khusus mendesain suatu kebijakan dalam bidang perkreditan secara sektoral. Kebijakan Bank Indonesia lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan UKM, terutama yang berbasis komoditas unggulan (Ashari, 2009).

Pengembangan klaster secara umum yang dilakukan adalah dengan menentukan kriteria dari program/sektor/komoditas yang akan difasilitasi bersama. Sumber informasi yang diperoleh berasal dari *Baseline Economic Survey (BES)*, yaitu survey yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengidentifikasi komoditas unggulan wilayah. Dari data tersebut dilakukan diskusi dengan stakeholder untuk menentukan komoditas terpilih dengan tetap mempertahankan komoditas yang akan dikembangkan pemerintah daerah atau komoditas yang mempunyai daya saing tinggi. Langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi lapangan untuk melihat rantai nilai (*value chain*) dari pelaku yang terlibat sekaligus mengidentifikasi potensi, hambatan, serta daya saing komoditas, dan lain-lain. Hasil identifikasi selanjutnya diklarifikasi dengan pelaku melalui *Focus Group Discussion (FGD)* untuk menentukan hambatan dan solusi yang akan dilakukan sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dilibatkan. Selanjutnya, intervensi dapat dilakukan berdasarkan tujuan pengembangan yang telah disepakati bersama stakeholders dan pelaku/UMKM. Dalam implementasinya, evaluasi dan monitoring dilakukan pula untuk perbaikan rencana kerja sekaligus mengidentifikasi *lesson learned* yang dapat dibangun bersama *stakeholders*. (Bank Indonesia, 2011).

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BI untuk mendukung program ini adalah

1. Pola pembiayaan UMKM terutama sektor agribisnis saat ini ada 88 pola pembiayaan konvensional dan 21 pola pembiayaan syariah.
2. Pengembangan klaster melalui pengembangan UMKM yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan pengembangan klaster komoditas unggulan di 6 wilayah kantor BI antara lain untuk komoditas rumput laut, emping melinjo, paprika dan opak. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah baik pemda, perbankan dan instansi terkait. Sampai sekarang sudah banyak sekali komoditas unggulan yang menjadi objek penelitian BI dalam rangka pengklasteran produk agribisnis.
3. Pola Kemitraan bertujuan melihat berbagai pola kemitraan antara usaha menengah/besar dengan UMKM dalam rangka potensi peningkatan akses kredit ke

bank. Dalam kemitraan tersebut, usaha menengah/besar dapat berperan sebagai pemberi rekomendasi, avalis, dan juga memberikan *cash collateral* bagi UMKM yang menjadi mitra dalam hubungan usaha kemitraan. Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang banyak terlibat dalam hubungan kemitraan dengan usaha menengah dan besar (Ashari, 2009)

Pola pembiayaan yang dilakukan untuk pengembangan klaster agribisnis di Propinsi Banten adalah dengan pola kemitraan dan pengembangan klaster. Sampai saat ini banyak pembiayaan yang sedang dilakukan oleh BI untuk komoditas lainnya seperti komoditas bawang merah yang dikembangkan di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Dapat dikatakan kegiatan ini sangat efektif karena selain meningkatkan pengetahuan, produksi dan kualitas hasil produksi juga semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan harga jual di pasaran

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbankan nasional merupakan salah satu lembaga yang sangat berperan dalam melakukan pengembangan UMKM di Indonesia dan pembiayaan untuk sektor agribisnis. Bank Indonesia bekerjasama dengan dinas terkait telah banyak melakukan kajian untuk produk-produk unggulan agribisnis di setiap propinsi yang ada di Indonesia. Hal ini sangat memudahkan para pengusaha, akademisi dan pihak *stakeholder* untuk memperoleh data ataupun informasi pengembangan usaha. Sampai saat ini proporsi kredit untuk sektor pertanian masih sangat rendah yaitu hanya 6 % jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor perdagangan maupun industry. Hal ini disebabkan adanya faktor resiko yang di alami oleh produk-produk pertanian. Rendahnya alokasi kredit disebabkan karena resiko sektor pertanian, tidak ada pengalaman menyalurkan kredit di sektor pertanian, banyak kredit macet seperti KUT, resiko bencana dan resiko admistrasi atau jaminan. Dari sisi petani meminjam uang dengan bank selalu identik dengan administrasi yang rumit, tidak ada jaminan, faktor pelayanan yang tidak baik, tidak adanya jaminan dan kurangnya pengetahuan petani tentang pembiayaan di bank sehingga petani enggan meminjam ke bank melainkan memilih pinjam kepada rentenir. Program yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan solusi bagi petani yang tidak bisa mengakses ke bank komersial. Bank Indonesia memberikan pembiayaan, pelatihan produksi, pendampingan oleh petani yang sudah berhasil bahkan pendampingan pemasaran hasil-hasil pertanian. Ada 3 komoditas utama yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu klasteremping melinjo, gula

aren dan cabai merah. Petani sangat merasakan adanya peningkatan pengetahuandalam mengelola usahatannya sehingga semakin semangat untuk mengembangkan produk tersebut. Perlu ada penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi komoditas unggul lain di Propinsi Banten yang bisa di kembangkan dengan proses kemitraan dari Bank Indonesia. Kajian ini juga bisa dilanjutkan dengan analisis yang lebih mendalam dan bisa dianalisis secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan Akhir Kajian Efektifitas Model Penumbuhan Klaster Bisnis, UKM Berbasis Agribisnis. 2012

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten. Lebak. 2005

Biro Pusat Statistik (BPS) .2009

Profil Potensi Ekonomi Propinsi Banten 2009

Laporan Bank Indonesia.2011

Potensi Propinsi Banten. 2012

Pengembangan Agribisnis di Provinsi Banten.2013

Ashari, 2009. Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia.

Forum Penelitian Agroekonomi vol.27 No.1 Tahun 2009.

Bank Indonesia, 2009, Pola Pembiayaan Emping Melinjo.

Bank Indonesia, 2009. Pola Pembiayaan Gula Aren

Bank Indonesia, 2013. Pola Pembiayaan Cabe Merah

Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Dinkop PKM), 2005. Kriteria UKM dan UMKM

Enright, M. 1996. Regional klusters and firm strategy', in *Business Networks: Prospects for*

Regional Development, Eds. U. Staber, N. Schaefer & B. Sharma, de Gruyter, Berlin and New

Harian Umum Pelita, 3 Agustus 2014, Potensi Emping Melinjo Di Propinsi Banten
<http://investment.banten.go.id>.

Porter, M. 1998a. Kluster and the new economics of competition, *Harvard Business Review*, vol.7, no.6, pp. 6-15.

Schmitz, 1995. Collective efficiency: Growth path for small scale industry *Journal of Development Studies*, vol.31, no.4, pp. 529-566.